

DAFTAR PUSTAKA

- Amiini, N. S. (2016a). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Negeri Jumapolo. *Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 5(6).
- Amiini, N. S. (2016b). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMA Negeri Jumapolo. *Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 5(6).
- Andriani. (2013). *Pajak dan Pembangunan*. UI Press, Jakarta.
- Ardani, E. F., & Trihantoyo, S. (2020). Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Lingkungan SD Negeri Banyu Urip VIII Surabaya. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 08(03), 134–144.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Bahan Tayang SP2020 Jateng. *Badan Pusat Statistik*, 21.
- Brebes, P. (2023). *Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022*. PPID Brebes. <https://ppid.brebeskab.go.id/user/unduhinfobijak.php?idtersedia=147&ket=Opini BPk thn 2022>
- Budaya, B. (2017). Manajemen pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar yang efektif. *Likhitaprajna*, 18(1), 42–59.
- Burhan, B. (2008). Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya. *Jakarta: Kencana*.
- Fanani, B., & Pracistia, G. (2014). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Praktek Income Smoothing Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2009-2014. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 6(1).
- Gita, K., & Sinarwati, K. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Sma Negeri 4 Singaraja Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11 (2), 340-348., 11 (2)(2), 340–348.
- Hakim, B. S. R. (2020). *Analisis Penerapan Tarif Pajak Penghasilan PT. X Berdasarkan Pp 23 Tahun 2018 Dan Undang Undang Pph Pasal 17*. Universitas Airlangga.
- Hakim, Lukman. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Handayani, N., & Zahro, M. (2021). Potret Pemotongan dan Pemungutan Pajak

- oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Wahana Riset Akuntansi*, 9(1), 62–7.
- Handayani, N., & Zahro, M. (2021). Potret Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Wahana Riset Akuntansi*, 9(1), 62. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i1.111962>
- Hariswati, N. (2015a). Analisa Akuntabilitas Dan Transparansi Tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Bos. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 75–8.
- Hariswati, N. (2015b). Analisa akuntabilitas dan transparansi tentang implementasi kebijakan pengelolaan BOS. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 75–88.
- Karim, F., Saleh, F. M., Meldawati, L., & Lande, M. P. (2023). Sosialisasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Lab School UNTAD. *JAPEPAM, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1–6.
- Kemenkeu. (2016). *Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 /Pmk.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.* JDIH Kemenkeu. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2016/101~PMK.010~2016Per.pdf>
- Kemenkeu. (2022). *PPh Pasal 23.* DJPb. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh/id/layanan/perpajakan/pph-pasal-23.html>
- Khalida, M. S., & Setiawan, B. (2021). Pelaksanaan Pajak Penghasilan Atas Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Wilayah KPP Pratama Tegal. *Educoretax*, 1(2), 104-.
- Khalida, M. S., & Setiawan, B. (2021). Pelaksanaan Pajak Penghasilan Atas Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Wilayah KPP Pratama Tegal. *Educoretax*, 1(2), 104–127. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i2.12>
- Laskari, F. (2018). Oknum Kepala Sekolah SMPN 5 Belinyu Jadi Tersangka Korupsi Dana BOS. *Belitung.Tribunnews.Com.*
- Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. (2023). <https://markas.kemdikbud.go.id>. *Jawa Tengah.*
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Maya (ed.); XIX). CV. Andi Offset.
- Miles, & H. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Miles, & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.

- Moleong, J. L. (2020). metodologi penelitian kualitatif J lexy Moleong. *Jurnal Ilmiah*.
- NOVANTO, B. F. (2022). *Implementasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Brebes*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Pajak, D. J. (2016). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Pajak, D. J. (2019, September). Kewajiban Perpajakan Bendahara Dana BOS/BOP. *Pajak.Go.Id*.
- Pajak, O. (2023, September). *Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22)*.
- Permendikbudriset. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan*. Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/224157/permendikbudriset-no-2-tahun-2022>
- Permendikbudristek. (2022). *Permendikbudristek No 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*.
- PMK. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik*. Data Web Peraturan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177403/pmk-no-119pmk072021>
- Prastowo, A. (2012). *Metodologi Penelitian Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Cet. III.
- Pujie Astuti, Y., & Susetyo Budi, B. (2022). *Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Memahami Laporan Keuangan Koperasi Bagi Pengguna: Anggota Koperasimemahami Laporan Keuangan Koperasi Bagi Pengguna: Anggota Koperasi*.
- Rahayu, S., Yanuarsari, R., Suwandana, C., Romansyah, R., Farid, M., Supriatna, A., Latifah, E. D., Rahman, A. A. A. A., Asmadi, I., & Habaib, M. (2023). *Kebijakan dan Kinerja Birokrasi Pendidikan*. Tohar Media.
- Rahayuningsih, S. (2021a). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110-.
- Rahayuningsih, S. (2021b). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110–117.

- Resmi, S. (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- RI, K. K. (2021). *PPh Pasal 21*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-21.html>
- Rivaldi, R., Anand, D., & Astuti, A. D. (2022). Analisis Kepatuhan Bendahara Dana Bos Sdn X Terhadap Aspek Perpajakan. *Jurnal Proaksi*, 9(4), 362–378. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i4.3416>
- Saisarani, K. G. P., & Sinarwati, N. K. (2021). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 340.
- Salsabila, Z. (2020). *Tinjauan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Belanja Dana BOS oleh Bendahara BOS di Wilayah KPP Pratama Salatiga (Studi Kasus SD Negeri Jetis 02 Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)*. Tangerang Selatan.
- Sari, S. W. O., Hadiyanto, & Santoso, Y. (2019). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*.
- Sirait, T. A. (2021). *Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan atas Belanja Dana BOS oleh Bendahara BOS (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidikalang)*. Tangerang Selatan.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit. Alfabeta, Bandung.
- Suliyanto. (2005). *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*. Ghalia.
- Suripto, I. (2018). Diduga Korupsi Dana BOS, Kepala dan Waka SMK di Brebes Ditahan. *DetikNews*.
- Theresa Agatha Sirait. (2021). *Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan atas Belanja Dana BOS oleh Bendahara BOS (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidikalang)*.
- Undang-Undang. (1983). *Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

- Watung, D. N. (2013). Analisis Perhitungan dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya. *Jurnal EMBA*, 1(3), 265–273.
- Widiantoro, H. (2019). Perlakuan Perpajakan Bendahara Sekolah Swasta vs Sekolah Negeri. *Direktorat Jenderal Pajak*.
- Widiawati, N. (2020). *Widiawati, Nani. Metodologi Penelitian: Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Edu Publisher.
- Widyatmoko, S. (2017). *Pengelolaan Dana BANTUAN Operasional Sekolah (BOS) Di SD N Kemasan I Surakarta*. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Widyatmoko, S., & Suyatmini, S. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemasan I Surakarta. *Manajemen Pendidikan*, 12(3), 153–160.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan wawancara analisis pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Brebes.

A. Ditujukan kepada Kepala Sekolah

1. Apa tanggung jawab utama Kepala Sekolah terkait pemungutan pajak di instansi yang Anda pimpin?
2. Bagaimana Kepala Sekolah memastikan bahwa semua pajak dipotong dan dipungut secara akurat dari lembaga pendidikan di bawah yurisdiksinya?
3. Apakah Kepala Sekolah mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang ditanggung oleh Lembaga Pendidikan?
4. Apakah Kepala Sekolah mengetahui tarif masing-masing jenis pajak tersebut?
5. Apakah Kepala Sekolah mengetahui mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan masing-masing jenis pajak tersebut?
6. Apa saja tantangan yang paling sering dihadapi Kepala Sekolah dalam proses pemotongan dan pemungutan pajak pada lembaga pendidikan?
7. Bagaimana cara Kepala Sekolah mengatasi ketidaksesuaian atau kesalahan yang ditemukan dalam proses pemungutan pajak?
8. Langkah apa saja yang dilakukan Kepala Sekolah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemungutan pajak?
9. Bagaimana Kepala Sekolah berkolaborasi dengan departemen atau lembaga lain untuk memastikan pengumpulan dan pengelolaan pajak yang efektif?
10. Apa manfaat pengumpulan dan pengelolaan pajak yang efektif oleh Kepala Sekolah?
11. Bagaimana Kepala Sekolah selalu mengetahui perubahan undang-undang atau peraturan perpajakan yang mungkin berdampak pada pengumpulan dan pengelolaan pajak?

12. Apa akibat jika Kepala Sekolah tidak melakukan pemungutan pajak secara akurat atau tepat waktu?
13. Langkah apa yang dilakukan Kepala Sekolah untuk mencegah penghindaran atau ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh lembaga pendidikan?

B. Ditujukan kepada Bendahara BOSP

1. Apa tanggung jawab utama Bendahara Dana Dukungan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) terkait pemungutan pajak?
2. Bagaimana Bendahara BOSP memastikan bahwa semua pajak dipotong dan dipungut secara akurat dari lembaga pendidikan di bawah yurisdiksinya?
3. Apakah Bendahara BOSP mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang ditanggung oleh Lembaga pendidikan?
4. Apakah Bendahara BOSP mengetahui tarif masing-masing jenis pajak tersebut?
5. Apakah Bendahara BOSP mengetahui mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan masing-masing jenis pajak tersebut?
6. Apa saja tantangan yang paling sering dihadapi Bendahara BOSP dalam proses pemotongan dan pemungutan pajak pada lembaga pendidikan?
7. Bagaimana cara Bendahara BOSP mengatasi ketidaksesuaian atau kesalahan yang ditemukan dalam proses pemungutan pajak?
8. Langkah apa saja yang dilakukan Bendahara BOSP untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemungutan pajak?
9. Bagaimana Bendahara BOSP berkolaborasi dengan departemen atau lembaga lain untuk memastikan pengumpulan dan pengelolaan pajak yang efektif?
10. Apa manfaat pengumpulan dan pengelolaan pajak yang efektif oleh Bendahara BOSP?

11. Bagaimana Bendahara BOSP selalu mengetahui perubahan undang-undang atau peraturan perpajakan yang mungkin berdampak pada pengumpulan dan pengelolaan pajak?
12. Apa akibat jika Bendahara BOSP tidak melakukan pemungutan pajak secara akurat atau tepat waktu?
13. Langkah apa yang dilakukan Bendahara BOSP untuk mencegah penghindaran atau ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh lembaga pendidikan?
14. Apakah lembaga pendidikan tempat Anda bekerja pernah terlambat atau tidak melakukan kewajiban perpajakan?
15. Apa yang Anda lakukan selanjutnya jika terlambat atau tidak melakukan kewajiban perpajakan?

LAMPIRAN 2. DOKUMENTASI WAWANCARA

a. Wawancara di SDN Brebes 02



b. Wawancara di SMPN 2 Brebes

LAMPIRAN 3. HASIL WAWANCARA

1. Hasil Wawancara di SDN Brebes 02

- a. Judul : Wawancara dengan Kepala SDN Brebes 02
 Tanggal : 18 Juni 2024
 Nama Informan : Ibu YP

Pertanyaan	Jawaban	Topik
<p>Apa tanggung jawab utama Kepala Sekolah terkait pemungutan pajak di satuan pendidikan yang Anda pimpin?</p>	<p>Kepala Sekolah bertugas untuk mengelola pengeluaran sesuai dengan RKAS dan pembayaran pajaknya yang disesuaikan dengan petunjuk teknis bos. Saya melakukan <i>review</i> RKAS yang telah dibuat Bendahara, untuk kemudian diajukan pengesahan ke Dindikpora Kab. Brebes.</p>	<p>Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah terkait pemungutan pajak.</p>
<p>Bagaimana Kepala Sekolah memastikan bahwa semua pajak dipotong dan dipungut secara akurat dari lembaga pendidikan di bawah yurisdiksinya?</p>	<p>Biasanya bendahara menyampaikan ke kepala sekolah setiap kali ada transaksi perpajakan, nanti saya akan mengeceknya sesuai dengan peraturan perpajakan.</p>	<p>Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah.</p>
<p>Apakah Kepala Sekolah mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang ditanggung oleh Satuan Pendidikan?</p>	<p>Yang saya tahu yaitu terkait pembelian barang habis pakai, belanja makan minum, dan pengadaan sarana prasarana atau pembelian barang melalui siplah itu secara langsung sudah termasuk pajaknya.</p>	<p>Jenis Pajak atas transaksi dari dana BOS.</p>
<p>Apakah Kepala Sekolah mengetahui tarif masing-masing jenis pajak tersebut?</p>	<p>Tarif pajak yang saya tahu yang berlaku contohnya Pajak Penghasilan dengan tarif 11%, golongan 2 0%, golongan 3 5%, golongan 4 15%, kemudian untuk non golongan mungkin 5%.</p>	<p>Tarif Pajak atas transaksi dari dana BOS.</p>
<p>Bagaimana Kepala Sekolah selalu mengetahui perubahan undang-undang atau peraturan perpajakan yang mungkin berdampak pada pengumpulan dan pengelolaan pajak?</p>	<p>Saya sering berselancar di <i>browser</i>, untuk mengetahui terkait peraturan perpajakan, kemudian saya menanyakannya kepada pihak Dindikpora. Selain itu saya juga sering berkomunikasi dengan sesama Kepala Sekolah dalam grup <i>whatsapp</i>.</p>	<p>Perubahan peraturan perpajakan.</p>

<p>Apakah Kepala Sekolah mengetahui mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan masing-masing jenis pajak tersebut?</p>	<p>Pasti, saya mengetahui setiap Bendahara akan membayarkan pajak. Kalau masalah perhitungan saya tidak begitu paham, saya hanya mempercayakan dan menyerahkan kepada bendahara, kemudian saya tinggal mengevaluasi dan mengotorisasi, yang terpenting saya tahu bahwa pajak telah dibayarkan.</p>	<p>Mekanisme perpajakan atas transaksi dari dana BOS.</p>
<p>Apa saja tantangan yang paling sering dihadapi Kepala Sekolah dalam proses pemotongan dan pemungutan pajak pada satuan pendidikan?</p>	<p>Tantangannya terkait tarif pajak yang mahal, dimana pembayaran pajak tersebut diambil dari dana BOS yang diterima sekolah, sehingga kami harus bisa mengaturnya, antara memenuhi kebutuhan sekolah dan pajaknya. Kemudian bagaimana kita bisa merealisasikan sesuai dengan RKAS yang sudah disusun, dan saat penyusunan RKAS nya dimana harus menyesuaikan dengan dana yang ada. Tetapi pada kenyataannya, ada program yang dilaksanakan sekolah, tetapi tidak diperbolehkan membiayainya dari dana BOS</p>	<p>Kendala yang ditemui.</p>
<p>Jika ada kegiatan yang tidak diperkenankan dianggarkan dari dana BOSP, bagaimana Kepala Sekolah mengatasinya?</p>	<p>Kami mengadakan pertemuan dengan Komite dan Wali Murid untuk membahasnya dan mencari kesepakatan bagaimana untuk membiayai program tersebut.</p>	<p>Solusi atas kendala yang ditemui.</p>
<p>Langkah apa saja yang dilakukan Kepala Sekolah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemungutan pajak?</p>	<p>Untuk menjaga akuntabilitas pemungutan pajaknya yaitu dengan mempelajari RKAS nya, juknis perpajakan, serta berkoordinasi dengan bendahara. Dan untuk menjaga transparansinya dengan cara bendahara melaporkan mengenai kewajiban perpajakannya, transparansi itu kemudian dibuktikan dengan setor pajak. Selain itu, keterbukaan dengan wali murid juga dilakukan</p>	<p>Strategi untuk menjaga transparansi pemungutan pajak.</p>

	dengan cara mengadakan pertemuan rutin atau secara lisan dengan perwakilan Komite Sekolah.	
Bagaimana Kepala Sekolah berkolaborasi dengan departemen atau lembaga lain untuk memastikan pengumpulan dan pengelolaan pajak yang efektif?	Untuk memastikan pengelolaan pajak yang efektif yaitu dengan membangun komunikasi dengan bendahara, ketika ada informasi mengenai hal baru terkait pajak bisa di koordinasikan bersama bendahara, atau jika ada kendala kita bisa melaporkan ke dinas pendidikan.	Strategi kolaborasi dan sinergi yang baik.
Apa manfaat pengumpulan dan pengelolaan pajak yang efektif oleh Kepala Sekolah?	Yang pasti kita bekerja dengan aman, karena sudah membayarkan pajak sesuai dengan prosedur yang sesuai, sehingga untuk kedepan tidak ada hambatan.	Manfaat tertib memungut pajak.
Apa akibat jika Kepala Sekolah tidak melakukan pemungutan pajak secara akurat atau tepat waktu?	Pastinya ada sanksi, tapi dari kami tidak pernah terkena sanksi, karena kita selalu membayarkan pajak.	Akibat tidak melakukan pemungutan pajak.
Langkah apa yang dilakukan Kepala Sekolah untuk mencegah penghindaran atau ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh satuan pendidikan?	Selalu mengingatkan ke bendahara untuk membayar pajak, dan mengingatkan juga terkait diarkasnya agar selalu diceklis pajaknya.	Langkah mencegah penghindaran pajak.

- b. Judul : Wawancara dengan Bendahara SDN Brebes 02
Tanggal : 18 Juni 2024
Nama Informan : Bapak AY

Pertanyaan	Jawaban	Topik
Apa tanggung jawab utama Bendahara Dana BOSP terkait pemungutan pajak?	Bendahara bertugas untuk memungut, membayar dan melaporkan pajak atas transaksi dari dana BOS.	Tugas dan tanggung jawab Bendahara terkait pemungutan pajak.
Bagaimana Bendahara memastikan bahwa semua pajak dipotong dan dipungut secara akurat dari satuan	Saya melakukan pembayaran pajak sesuai yang tertera dalam ARKAS. Sebelumnya saya mencetak buku pembantu pajak,	Tugas dan tanggung jawab Bendahara.

Pendidikan di bawah yurisdiksinya?	untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan.	
Apakah Bendahara BOSP mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang ditanggung oleh satuan pendidikan?	Jenis pajak yang terkena yaitu PPh Pasal 22, 21, dan PPN. Biasanya atas belanja pemeliharaan dikenakan tarif PPh Pasal 22, untuk honor dikenakan PPh Pasal 21, PPN untuk pembelian barang, dan jika harga barangnya lebih dari Rp2.000.000,- kalau tidak salah dikenakan juga PPh Pasal 22.	Jenis Pajak atas transaksi dari dana BOS.
Apakah Bendahara BOSP mengetahui tarif masing-masing jenis pajak tersebut?	Kalau tidak salah PPN tarifnya 10%, Belanja Makan Minum dikenakan 2 pajak, yaitu pajak pusat sebesar 2% dan pajak daerah sebesar 10%, tetapi tidak di <i>cover</i> dari dana BOS. Untuk PPh, golongan 2 tarifnya 0%, golongan 3 tarifnya 5%, golongan 4 tarifnya 15%.	Tarif Pajak atas transaksi dari dana BOS.
Apakah Bendahara BOSP mengetahui mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan masing-masing jenis pajak tersebut?	Mekanisme perhitungan pajak untuk setiap transaksi berbeda, misal perhitungan untuk lembur, maksimal 2 jam dalam sehari, diluar jam kerja. Bukti dukung untuk kegiatan tersebut yaitu daftar hadir dan dokumentasi. Kalau PPN dikenakan untuk pembelian barang diatas Rp2.000.000,- kalau tidak salah.	Mekanisme perpajakan atas transaksi dari dana BOS.
Apa saja tantangan yang paling sering dihadapi Bendahara BOSP dalam proses pemotongan dan pemungutan pajak pada lembaga pendidikan?	Transaksi atas pembelian secara <i>offline</i> dan <i>online</i> biasanya ada selisih harganya, sehingga beda juga pajaknya, lebih murah yang secara <i>offline</i> , tetapi ada instruksi untuk beralih menggunakan pembelian secara <i>online</i> melalui siplah, sehingga pajak yang dipungut lebih besar. Kemudian terkait pembayaran pajak yang diwajibkan per item, sedangkan antrian saat membayar pajak panjang, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk membayar pajak. Selain itu	Tantangan yang dihadapi.

	<p>terlambatnya salur dana bos, sehingga bayar pajaknya terlambat, karena menunggu dananya masuk ke rekening dahulu. Ada lagi waktu 2023 awal, tahun pertama pemakaian ARKAS, aplikasinya masih belum optimal untuk digunakan, sehingga sempat ada kesalahan dalam nominal pajak yang terhutang, sehingga terjadi lebih bayar untuk pembayaran pajaknya.</p>	
<p>Bagaimana cara Bendahara BOSP mengatasi ketidaksesuaian atau kesalahan yang ditemukan dalam proses pemungutan pajak?</p>	<p>Kami tidak menemukan solusi atas kendala yang di temui di dalam aplikasi, selama ini kami hanya bisa mengikuti saja yang tertera di aplikasi, terkait pajak terutangnya, paling kendala tersebut kami sampaikan ke Dinas Pendidikan, serta melakukan diskusi di <i>whatsapp</i> grup bendahara. Kalau terkait besarnya tarif pajak, saya meminimalisirnya pada saat menyusun RKAS nya, misal untuk pembelian dipecah supaya tidak lebih dari Rp 2.000.000,- dalam satu transaksi.</p>	<p>Solusi atas kesalahan yang ditemui.</p>
<p>Langkah apa saja yang dilakukan Bendahara BOSP untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemungutan pajak?</p>	<p>Sebelum membayar pajak, saya cetak Buku Pembantu Pajak, untuk kemudian saya laporkan ke Kepala Sekolah.</p>	<p>Transparansi kewajiban perpajakan.</p>
<p>Bagaimana Bendahara BOSP berkolaborasi dengan departemen atau lembaga lain untuk memastikan pengumpulan dan pengelolaan pajak yang efektif?</p>	<p>Saya membuat <i>e-billing</i> dari npwp Dinas Pendidikan di website djp, kemudian membayarkannya ke kantor pos. Untuk pajak daerah, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Bapenda sehingga sekolah hanya merekap transaksi yang menurut kami terkena pajak daerah, kemudian akan dibuatkan seperti <i>e-billing</i> oleh Bapenda, jadi sekolah tinggal membayarnya.</p>	<p>Strategi kolaborasi dan sinergi yang baik.</p>

<p>Apa manfaat pengumpulan dan pengelolaan pajak yang efektif oleh Bendahara BOSP?</p>	<p>Kita dapat berpartisipasi untuk pembangunan Negara. Saya lebih baik meminimalisir besaran pajaknya pada saat menyusun RKAS, daripada tidak membayar pajak.</p>	<p>Manfaat tertib memungut pajak.</p>
<p>Bagaimana Bendahara BOSP selalu mengetahui perubahan undang-undang atau peraturan perpajakan yang mungkin berdampak pada pengumpulan dan pengelolaan pajak?</p>	<p>Saya hanya mengikuti pajak terhutang yang tertera pada ARKAS, sehingga tidak perlu menghafal tarif pajak yang berubah-ubah.</p>	<p>Perubahan peraturan perpajakan.</p>
<p>Apa akibat jika Bendahara BOSP tidak melakukan pemungutan pajak secara akurat atau tepat waktu?</p>	<p>Saat ada pemeriksaan dari Dinas Pendidikan atau BPK, jika kita tidak memungut pajak, akan ditindaklanjuti untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan cara menghitung ulang transaksi yang seharusnya terkena pajak kemudian wajib membayar pajak terhutangnya. Kemudian ketika akhir tahun, jika kita belum memenuhi kewajiban perpajakan kita, biasanya akan terjadi silpa, dan berimbas pada dipotongnya pagu bos untuk tahun berikutnya.</p>	<p>Akibat tidak melakukan pemungutan pajak.</p>
<p>Langkah apa yang dilakukan Bendahara BOSP untuk mencegah penghindaran atau ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh satuan pendidikan?</p>	<p>Saya hadir dalam kegiatan monev SPJ BOS yang diadakan oleh Dinas Pendidikan setiap 1 semester, jadi saya bisa mengetahui apa yang kurang dari SPJ yang sudah saya buat, termasuk kewajiban perpajakannya.</p>	<p>Strategi mencegah penghindaran pajak.</p>
<p>Apakah lembaga pendidikan tempat Anda bekerja pernah terlambat atau tidak melakukan kewajiban perpajakan?</p>	<p>Semenjak ada ARKAS di tahun 2023, kami tidak pernah tidak membayar pajak, paling terlambat karena menunggu dana salur, tetapi itu tidak masalah karena tidak terkena denda.</p>	<p>Keterlambatan dalam kewajiban perpajakan.</p>
<p>Apa yang Anda lakukan selanjutnya jika terlambat atau tidak melakukan kewajiban perpajakan?</p>	<p>Kami menyampaikan ke Dinas alasan kenapa belum memenuhi atau terlambat membayar pajak.</p>	<p>Langkah jika terlambat memenuhi</p>

		kewajiban perpajakan.
--	--	-----------------------

2. Hasil Wawancara di SMPN 2 Brebes

- a. Judul : Wawancara dengan Kepala SMPN 2 Brebes
Tanggal : 24 Juni 2024
Nama Informan : Bapak MI

Pertanyaan	Jawaban	Topik
Apa tanggung jawab utama Kepala Sekolah terkait pemungutan pajak di sekolah yang Anda pimpin?	Tanggung jawab utama kepala sekolah yaitu membelanjakan keuangan dengan dana BOS, kepala sekolah berkewajiban memastikan pajak yang dikenakan dipotong sesuai dengan anggaran belanja.	Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah.
Bagaimana Kepala Sekolah memastikan bahwa semua pajak dipotong dan dipungut secara akurat dari satuan pendidikan di bawah yurisdiksinya?	Kepala sekolah memberikan perintah dan berkoordinasi dengan bendahara dana BOS di sekolah untuk selalu memperhatikan aturan-aturan terkait. Kemudian bendahara diwajibkan melaporkan ke Kepala Sekolah sebelum membayar pajak.	Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah.
Apakah Kepala Sekolah mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang ditanggung oleh Satuan Pendidikan?	Saya sangat mengetahui dan memahami mengenai jenis pajak yang ditetapkan, karena dalam Permendikbud sudah dijelaskan, seperti PPN dan PPh.	Jenis Pajak atas transaksi dari dana BOS.
Apakah Kepala Sekolah mengetahui tarif masing-masing jenis pajak tersebut?	Saya memahami tarif pajak yang berlaku, contohnya PPN 11% dan untuk PPh pasal 21 tergantung golongannya, golongan 1 dan 2 tidak dikenakan pajak, dan golongan 3 dikenakan 5% dan golongan 4 dikenakan 15%, serta Pajak Daerah SSPD sebesar 10%.	Tarif Pajak atas transaksi dari dana BOS.
Apakah Kepala Sekolah mengetahui mekanisme perhitungan, pembayaran,	Kalau secara detail mungkin bendahara lebih paham, tapi kami selalu berkomunikasi terkait perhitungan perpajakannya, jadi	Mekanisme perpajakan atas transaksi

dan pelaporan masing-masing jenis pajak tersebut?	kami hitung manual dulu, kemudian cocokkan dengan yang tertera di ARKAS, jika sudah sesuai, kami cetak <i>e-billing</i> menggunakan npwp sekolah atau Dinas Pendidikan untuk kemudian membayar pajak terhutangnya.	dari dana BOS.
Apa saja tantangan yang paling sering dihadapi Kepala Sekolah dalam proses pemotongan dan pemungutan pajak pada lembaga pendidikan?	Ketika belanja, banyak rekanan yang belum memiliki NPWP, sehingga terkena pajak 2x lipat dari yang seharusnya. Kemudian terlambatnya dana salur yang menjadi problema bagi semua satuan pendidikan.	Kendala yang ditemui.
Bagaimana cara Kepala Sekolah mengatasi kendala yang ditemukan dalam proses pemungutan pajak tersebut?	Secara prinsip karena sekarang semenjak menggunakan ARKAS di tahun 2023, sudah ada instruksi untuk melakukan kewajiban perpajakan menggunakan NPWP institusi, di kami yaitu NPWP Dinas Pendidikan, maka tantangan itu tereliminir.	Solusi atas kendala yang ditemui.
Langkah apa saja yang dilakukan Kepala Sekolah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemungutan pajak?	Kegiatan yang menggunakan siplah sudah jelas transparansinya, karena pembayarannya sudah dilakukan pemotongan pajak secara otomatis. Kemudian untuk menjaga transparansinya yaitu dengan mengadakan rapat komite, dan jika sudah <i>fix</i> kami sosialisasikan RKAS di dalam rapat wali murid.	Strategi untuk menjaga transparansi pemungutan pajak.
Bagaimana Kepala Sekolah berkolaborasi dengan departemen atau lembaga lain untuk memastikan pengumpulan dan pengelolaan pajak yang efektif?	Sistem arkas itu yang paling efektif, kemudian pelaporan berjenjang dari sekolah ke dinas, yang dilakukan setiap bulan dalam BKU, lalu sistem pelaporan manual juga tetap dilakukan.	Strategi kolaborasi dan sinergi yang baik.
Apa manfaat pengumpulan dan pengelolaan pajak yang efektif oleh Kepala Sekolah?	Yang pertama kita melaksanakan tugas negara, yaitu memberikan kontribusi pendapatan daerah setempat dalam sektor pajak.	Manfaat tertib memungut pajak.

	Selanjutnya kita sebagai petugas di sekolah memberikan kenyamanan bahwa negara juga terjamin dalam hal pendapatan.	
Bagaimana kepala sekolah selalu mengetahui perubahan undang-undang atau peraturan perpajakan yang mungkin berdampak pada aturan perpajakan disekolah ini ?	Biasanya dinas pendidikan memberikan informasi kepada pihak sekolah terkait dengan petunjuk teknis pengelolaan dana bos, jadi memang antara Dinas dan sekolah harus selalu berdiskusi dan berkolaborasi.	Perubahan peraturan perpajakan.
Apa akibat jika Kepala Sekolah tidak melakukan pemungutan pajak secara akurat atau tepat waktu?	Kalau tidak secara akurat kemungkinan ketika ada pemeriksaan oleh auditor, baik Inspektorat atau BPK, maka sekolah akan diberikan kewajiban untuk membayarkan kembali pajak yang terutang lagi. Kemudian jika tidak membayarkan pajak maka harus melakukan pelunasan pemungutan pajak tersebut.	Akibat tidak memungut pajak.
Langkah apa yang dilakukan Kepala Sekolah untuk mencegah penghindaran atau ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh satuan pendidikan?	Kepala sekolah harus mengetahui tentang peraturan perundang-undangan terkait pajak, kemudian berdiskusi dan memerintahkan bendahara untuk membayarkan pajak dan segera menyetorkan sesuai dengan pemungutan yang sudah ditentukan.	Langkah mencegah penghindaran pajak.

- b. Judul : **Wawancara dengan Bendahara SMPN 2 Brebes**
Tanggal : 24 Juni 2024
Nama Informan : Ibu SA

Pertanyaan	Jawaban	Topik
Apa tanggung jawab utama Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) terkait pemungutan pajak?	Bendahara memastikan secara betul tentang perhitungan pajaknya, apakah sudah sesuai atau belum, hal tersebut harus dipastikan, supaya ketika menggunakan dana tersebut dan menyetorkannya bisa secara akurat.	Tugas dan tanggung jawab Bendahara terkait pemungutan pajak.

Bagaimana Bendahara BOSP memastikan bahwa semua pajak dipotong dan dipungut secara akurat dari satuan pendidikan di bawah yurisdiksinya?	Biasanya kita melakukan perhitungan terlebih dahulu, termasuk rinciannya.	Tugas dan tanggung jawab Bendahara.
Apakah Bendahara BOSP mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang ditanggung oleh satuan pendidikan?	InsyaAllah harus tahu, karena memang ada pemberitahuan yang sifatnya bukan sosialisasi biasanya pemberitahuan di grup wa mengenai update informasi terkait dana BOS. Pajak yang dikenakan seperti PPN, PPh Pasal 21 dan 23.	Jenis Pajak atas transaksi dari dana BOS.
Apakah Bendahara BOSP mengetahui tarif masing-masing jenis pajak tersebut?	Jika ada pembelian nominal Rp2.000.000,- keatas, dikenakan pajak PPN sebesar 11%, sedangkan untuk PPh 21 dilihat dari golongannya, kemudian untuk pajak daerah itu dikenakan untuk transaksi yang dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2%.	Tarif Pajak atas transaksi dari dana BOS.
Apakah Bendahara BOSP mengetahui mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan masing-masing jenis pajak tersebut?	Biasanya saya menghitung secara manual dulu, kemudian kita lihat di ARKAS nya, jika sudah oke, kita membuat <i>e-billing</i> untuk dibayarkan pajak terhutanganya.	Mekanisme perpajakan atas transaksi dari dana BOS.
Apa saja tantangan yang paling sering dihadapi Bendahara BOSP dalam proses pemotongan dan pemungutan pajak pada lembaga pendidikan?	Selisih dalam menghitung, antara perhitungan manual dan yang muncul dalam ARKAS.	Tantangan yang dihadapi.
Bagaimana cara Bendahara BOSP mengatasi ketidaksesuaian atau kesalahan yang ditemukan dalam proses pemungutan pajak?	Saya mengecek ulang perhitungan, jika masih tidak sesuai saya berkonsultasi dengan dinas pendidikan atau melakukan diskusi di grup whatsapp bendahara.	Solusi atas kesalahan yang ditemui.
Langkah apa saja yang dilakukan Bendahara BOSP untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemungutan pajak?	Bendahara melakukan perincian sebelum membelanjakan dana BOS dan mendiskusikan atau menyampaikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah, kemudian setelah pembayaran	Transparansi kewajiban perpajakan.

	disusun rekapitulasi, nanti di akhir tahun kami sampaikan juga dalam rapat komite, jadi semua anggota mengetahui transparansi pemungutan pajak disekolah.	
Bagaimana Bendahara BOSP berkolaborasi dengan departemen atau lembaga lain untuk memastikan pengumpulan dan pengelolaan pajak yang efektif?	Yang jelas jika ada informasi yang kurang dipahami atau kami menemui kesulitan, saya akan bertanya atau berdiskusi dengan lembaga yang terkait, yaitu Dinas Pendidikan. Kemudian untuk pajak daerah kami berkolaborasi dengan Bapenda.	Strategi kolaborasi dan sinergi yang baik.
Apa manfaat pengumpulan dan pengelolaan pajak yang efektif oleh Bendahara BOSP?	Bendahara merasa terbantu dengan adanya sistem yang sudah tertata. Dengan adanya ARKAS ini bendahara merasa nyaman dan percaya diri dalam melaksanakan kewajiban yang seharusnya sebagai warga negara dalam membayar pajak, karena saya pribadi tidak hafal dengan tarif pajak yang dikenakan.	Manfaat tertib memungut pajak.
Bagaimana Bendahara BOSP selalu mengetahui perubahan undang-undang atau peraturan perpajakan yang mungkin berdampak pada pengumpulan dan pengelolaan pajak?	Walaupun ada perubahan juknis maupun perundang-undangan, saya dapat mengetahuinya dari grup dinas terkait. Jadi ketika ada info terbaru Dinas selalu membagikannya melalui whatsapp group.	Perubahan peraturan perpajakan.
Apa akibat jika Bendahara BOSP tidak melakukan pemungutan pajak secara akurat atau tepat waktu?	Mungkin akan ada surat teguran dari pihak terkait. Tapi sejauh ini, kami selalu membayarkan pajak, sehingga belum pernah mengalami hal tersebut.	Akibat tidak melakukan pemungutan pajak.
Langkah apa yang dilakukan Bendahara BOSP untuk mencegah penghindaran atau ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh satuan pendidikan?	Saya belum pernah melakukan penghindaran pajak, jadi setiap dari pembelanjaan yang dilakukan, jika dikenakan pajak ya memang sudah seharusnya dibayarkan dengan nominal yang ada.	Strategi mencegah penghindaran pajak.
Apakah satuan pendidikan tempat Anda bekerja pernah terlambat atau tidak	Selama bendahara menjabat belum pernah terlambat ataupun tidak melakukan pembayaran	Keterlambatan dalam

melakukan kewajiban perpajakan?	pajak jadi tidak ada pajak terhutang. Tapi juga menyesuaikan dengan diterimanya dana salur.	kewajiban perpajakan.
Apa yang Anda lakukan selanjutnya jika terlambat atau tidak melakukan kewajiban perpajakan?	Kami akan segera lapor serta melunasi dan melakukan pembayaran pajak yang ada.	Langkah jika terlambat memenuhi kewajiban perpajakan.